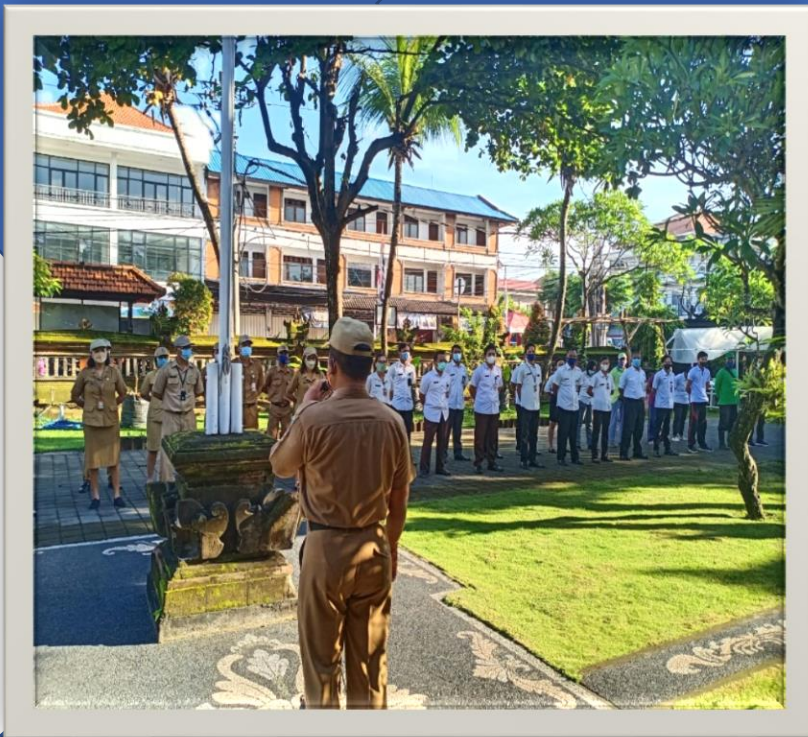




KECAMATAN DENPASAR BARAT



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Asung Kertha WaranugrahaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

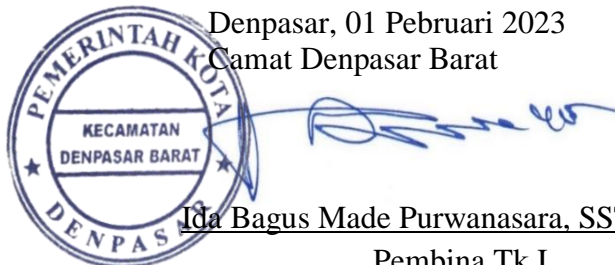
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus mengikuti prinsip - prinsip lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Juga merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Laporan Kinerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar tahun 2022 ini menyajikan gambaran tentang capaian kinerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2022. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar dalam melaksanakan berbagai kewajiban atas program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh para pejabat pada setiap tahunnya. Realisasi dan penetapan kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses penyusunan LKjIP. Dengan demikian diharapkan LKjIP tahun 2022 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna dalam penyajian seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dicapai dan telah dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Akhir kata kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh aparatur sipil negara di Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar.

Denpasar, 01 Pebruari 2023

Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19790411 199802 1 001

IKTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Barat atas pelaksanaan kerjanya selama tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi Perpres No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun belum ada PP dan aturan yang menindaklanjuti sampai LKjIP ini dibuat, dimana Kecamatan bukan lagi sebagai Wilayah Administrasi dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah apalagi dengan Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan mengakibatkan adanya perubahan mendasar dalam menentukan arah kebijakan Kecamatan. Mencermati kedudukan dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah, terkandung maksud dan tujuan dari Pemerintah untuk memposisikan Kecamatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi unsur-unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada intinya melaporkan pencapaian kinerja (performance result) tahun 2022 dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026. Secara pertanggungjawaban juga untuk mewujudkan akuntabilitas Camat Denpasar Barat kepada Walikota Denpasar, dan sarana untuk

mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

RPJMD Kecamatan Denpasar Barat telah menetapkan 6 Program dan 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Kecamatan Denpasar Barat telah, melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diberikan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil dan manfaat pada masyarakat. Selanjutnya program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan. Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan, dimana Penetapan Kinerja (Performance Contract/Agreement) yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dilaksanakan (Kinerja Aktual) oleh Camat dan perangkatnya termasuk Kelurahan di Kecamatan Denpasar Barat tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022, dengan 6 Program dan 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Walaupun pelaksanaan program berdasarkan prosentase indikator dan tolak ukur kinerja terlaksana sesuai dengan output (keluaran), dan realisasi anggaran (dijelaskan secara rinci dalam Bab III).

Adapun kendala dan cara mengatasi, sebagai berikut :

Kendala-kendala yang dihadapi :

- Keterbatasan kuantitas serta kualitas SDM di Kecamatan Denpasar Barat, dengan kegiatan-kegiatan kecamatan dalam satu tahun anggaran lebih banyak untuk menyelenggarakan kegiatan yang menjadi program OPD lain yang harus diselenggarakan ditingkat kecamatan serta cepatnya perubahan peraturan tentang Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kelurahan menjadi perangkat Kecamatan.

Cara untuk mengatasi kendala :

- Mengefektifkan pegawai yang ada dan memberikan diklat/bintek yang dibutuhkan oleh perangkat Kecamatan Denpasar Barat, serta berusaha menyesuaikan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya inovatif sebagai upaya pemecahan permasalahan yang ada sehingga perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada Camat yang semestinya diikuti pula perubahan anggaran, penambahan SDM dan pemberian SOP sesuai tupoksi dan pelimpahan kewenangan yang diberikan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | ii |
| Daftar isi..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang dan Gambaran Umum | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 3 |
| C. Struktur Organisasi..... | 4 |
| D. Peran Strategis Kantor Camat Denpasar Barat | 4 |
| E. Sistematika Penyajian | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis..... | 7 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 | 11 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 12 |
| BAB IV PENUTUP | 20 |
| LAMPIRAN..... | 22 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Gambaran Umum

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi sampai saat pembuatan LKjIP ini, PP dan peraturan dibawahnya tentang kecamatan belum ada. Sehingga kami masih berdasarkan PP 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dan Perda Kota Denpasar Nomor 35 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Dalam persyaratan dasar, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah serta cakupan minimal jumlah desa/kelurahan. Kecamatan Denpasar Barat dengan kondisi Geografis, Luas Wilayah : 24,13 km². (18,83 % dari luas kota Denpasar.) Terdiri dari : Tanah Sawah : 2,56 km² Tanah kering : a. Pekarangan rumah: 18,60 km², b. lain-lain: 2,90 km².

Batas Wilayah Kecamatan Denpasar Barat yaitu: Sebelah Utara: Kecamatan Denpasar Utara, dan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Sebelah Timur : Kecamatan Dentim. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Badung dan Kecamatan Denpasar Selatan. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara Badung. Dengan Jumlah Penduduk (Desember 2022) berdasarkan data tercatat secara administrasi di desa/kelurahan : Laki-laki : 93.561 org, Perempuan : 91.329 org. Jumlah: 184.890 org, dengan jumlah KK : 45.836 KK.

Kecamatan Denpasar Barat terdiri dari: 11(sebelas) Desa/Kelurahan yaitu: 3 Kelurahan, 8 Desa, 112 Dusun/Lingkungan, 2 Desa Pekraman dan 98 Banjar Adat. Adapun Desa/Kelurahannya yaitu :

1. Kelurahan Pemecutan
2. Kelurahan Padangsambian
3. Kelurahan Dauh Puri

4. Desa Padangsambian Kaja
5. Desa Padangsambian Kelod
6. Desa Pemecutan Kelod
7. Desa Dauh Puri Kelod
8. Desa Tegal Harum
9. Desa Tegal Kertha
10. Desa Dauh Puri Kangin
11. Desa Dauh Puri Kauh.

Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Barat



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perwali Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar sebelum keluarnya PP 18 tahun 2015 sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

Camat Denpasar Barat Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota dalam dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat, serta melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota serta mempertanggung jawabkan kepada Walikota.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi – seksi dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di Wilayah kecamatan.
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
- f. Melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- g. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- h. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas - tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- j. Memeriksa hasil kerja bawahan.

- k. Mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan.
- l. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja Kecamatan kepada Walikota.
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008, Camat Denpasar Barat Kota Denpasar dibantu oleh:

- 1. Sekretaris Kecamatan.
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2. Seksi Pemerintahan.
- 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan
- 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- 6. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai Kantor Camat Denpasar Barat yaitu: 126 orang, terdiri dari;

PNS : 54 orang dan Tenaga Kontrak : 72 orang.

D. Peran Strategis Kantor Camat Denpasar Barat

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah: **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"**, kemudian dijabarkan lebih konkrit ke dalam Misi, yaitu :

- 1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas, berikut dikuatkan dengan dasar bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan (baik itu koordinasi struktural maupun fungsional), pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka kecamatan Denpasar Barat mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemerintahan Kota Denpasar. Peran strategis dimaksud didukung dengan potensi wilayah dan jumlah penduduk serta perkembangan perekonomian dan budaya masyarakat yang terus berkembang. Hal tersebut tentu membawa dampak terhadap perkembangan pemerintahan kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Denpasar.

Fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Camat adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

E. Sistematika Penyajian

Sesuai Perpres 29 tahun 2014 dan Permen PAN&RB RI No. 53 tahun 2014, pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar selama tahun 2022. Capaian Kinerja (performance result) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Kantor Camat Denpasar Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintahan Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar.**Ikhtisar Eksekutif.**

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Kantor Camat Denpasar Barat dan struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Kantor Camat Denpasar Barat untuk periode 2021 – 2026 dan penetapan kinerja untuk tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis dan realisasi anggaran untuk tahun 2022.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang di perhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan wawasan dan cara pandang, baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan, dimana di dalam visi telah mengandung misi yang ingin diwujudkan, karena misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka Kecamatan Denpasar Barat mengarahkan visinya sebagai berikut: **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"**

Misi Pembangunan Kecamatan Denpasar Barat, sebagai penjabaran yang kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kecamatan Denpasar Barat 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.

3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

2. Motto Kecamatan

Dengan semangat **“Sewaka Dharma”** Kita tingkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical succes factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari misi di atas adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat”**.

b. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai Oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar adalah **“Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)”**

4. Strategi dan Arah kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Strategi dan Arah kebijakan sebagai berikut:

| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|
| 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar Barat |
| | 2. Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kecamatan Denpasar Barat |
| | 3. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas di Kecamatan Denpasar Barat |
| 2. Meningkatkan Pemberdayaan di Masyarakat | 1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat |
| | 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kecamatan Denpasar Barat |
| | 3. Meningkatkan Pengelolaan Nilai Tradisi, Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya |
| 3. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1. Meningkatkan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Denpasar Barat |
| 4. Meningkatkan Koordinasi Kewenangan Pemerintah di Kecamatan Denpasar Barat | 1. Meningkatkan Koordinasi antar Pimpinan di Kecamatan |
| 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa | 1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa |

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Barat dapat dilihat pada halaman lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Urusan Wajib Kewilayahan, dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat dalam 1 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 17.818.230.283,00 capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat yang dilaksanakan dalam 1 tahun dapat dilihat dalam rincian berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai

| | |
|-------------------|----------------------------|
| - Target Keuangan | Rp. 7.656.616.500,00 |
| - Realisasi | Rp. 7.383.206.040,00 (96%) |
| - Sisa Dana | Rp. 273.410.460,00 |
 - b. Belanja Barang & Jasa

| | |
|-------------------|----------------------------|
| - Target Keuangan | Rp. 8.643.931.880,00 |
| - Realisasi | Rp. 8.371.875.006,00 (97%) |
| - Sisa Dana | Rp. 272.056.874,00 |

2. Belanja Modal

| | |
|-------------------|----------------------------|
| - Target Keuangan | Rp. 1.517.681.903,00 |
| - Realisasi | Rp. 1.495.877.106,00 (98%) |
| - Sisa Dana | Rp. 21.804.797,00 |

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun Anggaran 2022, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----|---|---|--------|---|--|--|--|---------------|---------------|----|
| | | | | | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | 80% | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 7.650.616.500 | 7.377.206.040 | 96 |
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.836.682 | 10.682.700 | 99 |
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 352.296.400 | 335.539.200 | 95 |
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga | 39.551.092 | 37.467.100 | 95 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-------------|----|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 78.134.000 | 74.254.000 | 95 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.221.250 | 35.293.750 | 88 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Tersedianya Surat Kabar/Majalah | 29.400.000 | 28.140.000 | 96 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 135.218.200 | 129.015.899 | 95 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai | 167.396.634 | 163.610.000 | 98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|---------------|-----|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 229.530.000 | 164.102.312 | 71 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.068.633.192 | 2.065.971.832 | 100 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kaling) | 2.047.718.280 | 2.000.063.340 | 98 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.342.000 | 32.169.300 | 91 |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|-------------|-----|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 365.450.000 | 326.076.480 | 89 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 173.146.240 | 164.260.000 | 95 |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 136.575.000 | 135.971.000 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|---|--|--|-------------|------------|-----|
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | 100% | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 82.616.000 | 72.999.392 | 88 |
| | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu | 105.355.000 | 86.865.000 | 82 |
| | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 79.150.000 | 79.150.000 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|--|---|--|--|---------------|---------------|----|
| 3. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Panjang Jalan Lingkungan Yang Ditingkatkan | 1.259.836.471 | 1.248.648.207 | 99 |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Posyandu Yang Difasilitasi PMT Posyandu, Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN dan Kebersihan Lingkungan, Terlaksananya Kegiatan PKK, Terlaksananya Lomba Balita Indonesia, Tersedianya Profil Kelurahan | 2.300.434.142 | 2.278.812.500 | 99 |
| 4. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan | 343.913.200 | 320.097.600 | 93 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 5. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat | Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan | 100% | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar | 37.685.000 | 37.685.000 | 100 |
| 6. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | 100% | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Evaluasi RAPBDes | 24.175.000 | 21.877.500 | 90 |
| J U M L A H | | | | | | | | 17.818.230.283 | 17.250.958.152 | 97 |

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagai amanat Perpres 29 Tahun 2014 dan Permen PAN & RB Nomor 53 tahun 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggung jawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKjIP Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar ini merupakan sarana introspeksi diri bagi unit kerja dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Kantor Camat Denpasar Barat, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad meningkatkan peran pelayanan dengan semangat kerakyatan, kemantapan sehingga berkembang dan berakar serta membudaya di masyarakat Denpasar Barat. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar telah berhasil dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan Realisasi Anggaran) **Rp. 17.818.230.283,00** dan Realisasi **Rp. 17.250.958.152,00** atau sebesar **97,00 %**

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun – tahun mendatang

hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator – indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun-tahun pertama, hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun – tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak berkepentingan.

Denpasar, 01 Pebruari 2023

Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19790411 199802 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Made Purwanasara., SSTP.,M.Si
Jabatan : Camat Denpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


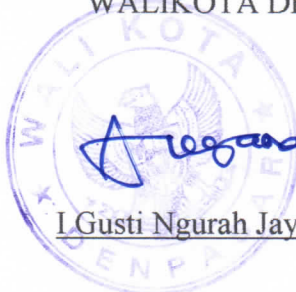
Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 26 Januari 2022



Pihak Kedua,

WALIKOTA DENPASAR



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,

CAMAT DENPASAR BARAT




Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si
Pembina
NIP: 19790411 199802 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|----------------------------------|--|--------|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80% |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|----------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 14.185.609.321 | APBD |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 152.645.000 | APBD |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1.965.106.613 | APBD |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 354.357.200 | APBD |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 37.685.000 | APBD |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 18.425.000 | APBD |

WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE

Denpasar, 26 Januari 2022
CAMAT DENPASAR BARAT



IDA BAGUS MADE PURWANASARA, SSTP., M.Si
NIP: 19790411 199802 1 001



PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR BARAT

Jl. Gn.Agung No. 191 Denpasar Kode Pos 80119

Telpon. (0361) 424352 Fax. (0361) 416295

www.denpasarkota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUGAS :

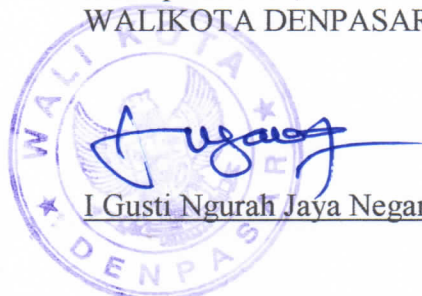
Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk Menangani Sebagian Urusan.

FUNGSI :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa/Kelurahan
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
- Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan

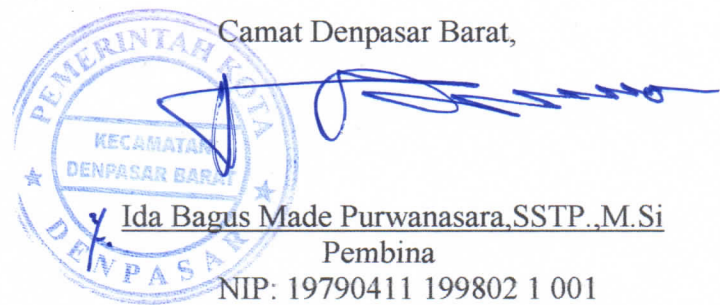
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|----------------------------------|--|--------|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80% |

Denpasar, 26 Januari 2022
Ditetapkan Oleh,
WALIKOTA DENPASAR



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Camat Denpasar Barat,



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si

Pembina

NIP: 19790411 199802 1 001

LAMPIRAN II

Form : Narasi Pencapaian IKU

Perangkat Daerah : Kecamatan Denpasar Barat

a. Indikator Kinerja Utama:

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2022 dengan Sasaran Daerah yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel”

menentukan 3 indikator sasaran, tiga indikator sasaran tersebut antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran daerah dan indikator kinerja utama adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan berkoordinasi dengan dinas terkait.

b. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

c. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

d. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

e. Anggaran dan Realisasi :

- Anggaran tersedia sebesar Rp.79.150.000,-
- Realisasi Rp.79.150.000,- mencapai 100 %, dan menghasilkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 77,12 (Baik) % berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat.

f. Permasalahan / Kendala : -

g. Solusi : -

h. Inovasi: -

i. Foto Kegiatan:

Nilai Indeks (Grade)

| UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|----------------------------------|-----------------|
| PERSYARATAN | 3,19 |
| PROSEDUR | 3,04 |
| WAKTU | 3,01 |
| BIAYA | 3,25 |
| SPEKIFIKASI PELAYANAN | 3,06 |
| KOMPETENSI PELAKSANA | 3,10 |
| PERILAKU PELAKSANA | 3,18 |
| PENANGANAN PENGADUAN DAN MASUKAN | 3,18 |
| SARANA PRASARANA | 3,03 |
| Nilai IKM | 77,12 |
| Mutu Pelayanan | B (Baik) |

SARAN & REKOMENDASI

Secara umum pelayanan publik yang dilakukan di Kecamatan Denpasar Barat dinilai Baik oleh masyarakat penggunaannya, dengan nilai IKM 77,12 (Baik).

Seluruh indikator yakni kejelasan persyaratan, prosedur pelayanan, ketepatan//kepastian waktu, kesesuaian tarif/biaya, kesesuaian spesifikasi pelayanan, kemampuan pegawai memberikan pelayanan, perilaku pegawai dalam melayani, respons terhadap keluhan layanan, reaksi pegawai atas penyampaian keluhan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pendukung berada pada angka baik.

Kepuasan masyarakat tertinggi yakni pada unsur pelayanan penanganan pengaduan dan masukan, unsur pelayanan terendah adalah pada unsur waktu atau ketepatan/kepastian waktu dan spesifikasi layanan.

Bahkan di masa pandemi, layanan publik di Kecamatan Denpasar Barat dinilai baik dan sangat membantu atau tidak mendapat kesulitan mendapatkan pelayanan setelah masa pandemi

j. Penghargaan :-



Denpasar, 01 Pebruari 2023
CAMAT DENPASAR BARAT

Ida Bagus Made Purwanasara
Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19790411 199802 1 001

LAMPIRAN III

Form : Narasi Pencapaian IKU

Perangkat Daerah : Kecamatan Denpasar Barat

a. Indikator Kinerja Utama:

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2022 dengan Sasaran Daerah yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel”

menentukan 3 indikator sasaran, tiga indikator sasaran tersebut antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran daerah dan indikator kinerja utama adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan berkoordinasi dengan dinas terkait.

b. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

c. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

d. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

e. Anggaran dan Realisasi :

- Anggaran tersedia sebesar Rp.105.355.000,-
- Realisasi Rp.86.865.000,- mencapai 82 %.

f. Permasalahan / Kendala : kegiatan ini tidak mencapai target karena ada beberapa belanja yang tidak bisa direalisasikan, seperti perjalanan dinas pkk anggaran hotel tidak direalisasikan sesuai anggaran.

g. Solusi : -

h. Inovasi: -

- i. Foto Kegiatan:
Perjalanan Dinas PKK



- j. Penghargaan : -

Denpasar, 01 Pebruari 2023
CAMAT DENPASAR BARAT



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19790411 199802 1 001